

BAB II

DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Value For Money

2.1.1. Pengertian Value For Money

Menurut Indra (2006), *Value For Money* merupakan tolak ukur dalam anggaran belanja organisasi sektor publik. Efisiensi dan efektivitas anggaran belanja merupakan salah satu prinsip utama dalam menyelenggarakan anggaran belanja agar dapat memberikan layanan yang lebih baik dan kesejahteraan yang maksimal.

Menurut Madiasmo (2009), *Value For Money* merupakan inti dari kinerja pada organisasi pemerintah. Kinerja pemerintah tidak dapat dilihat dari output yang dihasilkan saja, tetapi harus mempertimbangkan input, output, dan outcome secara bersama-sama.

Secara umum *Value for money* merupakan suatu organisasi sektor publik berkonsep pada pengelolaan yang didasarkan oleh tiga elemen utama, yakni ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Definisi dari ketiga elemen tersebut yaitu :

1. Ekonomi

Menurut Mahsun (2006), ekonomis adalah hubungan antara pasar dan masukan, dengan kata lain yaitu praktik pembelian barang dan jasa pada tingkat kuantitas dan kualitas tertentu dengan harga yang terbaik.

Keterkaitan ekonomi yaitu sejauh mana suatu organisasi sektor publik

dapat meminimalisir *input resources* yang digunakan yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2. Efisiensi

Menurut Indra (2006), efisiensi merupakan hubungan antara *input* dan *output* dimana barang jasa yang dibeli oleh organisasi digunakan untuk mencapai *output* tertentu. Secara umum efisiensi adalah perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3. Efektivitas

Menurut Haryanto (2007), efektivitas adalah hubungan *output* dengan tujuan dimana efektivitas diukur berdasarkan sejauh mana tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas suatu peningkatan hasil program yang dicapai dengan target yang ditetapkan. Sederhananya efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

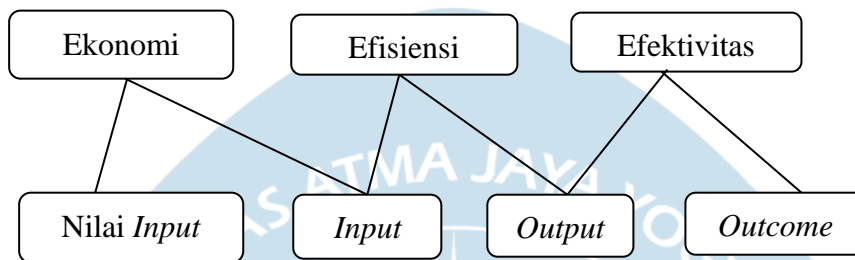
2.1.2. Konsep Value For Money

Menurut Haryanto (2007), konsep pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan elemen utama, yaitu: ekonomis, efisiensi, dan efektivitas

Menurut Mardiasmo (2009), elemen pokok yang mendasari pelaksanaan manajemen publik, meliputi: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Tujuan pelaksanaan *value for money* yang dikehendaki oleh masyarakat adalah pertanggungjawaban yaitu ekonomi yang hemat cermat dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisiensi berdaya guna dalam penggunaan sumber daya yaitu

mnggunakan sumber daya yang diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan dan efektivitas yang berhasil guna dengan artian dapat mencapai tujuan dan sasaran.

Secara sistematis *value for money* dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber: Mardiasmo (2009 : 5)

Gambar 2. 1. Konsep Value For Money

Adapun definisi *input*, *output* dan *outcome* pada konsep *value for money* menurut Mardiasmo (2009), yaitu :

1. *Input* (Masukan) merupakan sumber daya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan, program, dan aktivitas.
2. *Output* (Keluaran) merupakan hasil atau nilai tambah yang dicapai oleh kebijakan, program, dan aktivitas.
3. *Outcome* (Pencapaian hasil) merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu.

2.1.3. Indikator Value For Money

Indikator dalam *value for money* merupakan inti dari pengukuran kinerja pada organisasi pemerintahan. Menurut Mardiasmo (2008), indikator *value for money* dibagi menjadi dua bagian :

1. Indikator alokasi biaya (ekonomis dan efisiensi)

Ekonomis artinya tingkatan kualitas tertentu pada pembelian barang dan jasa dengan harga yang terbaik atau perolehan *input* dengan kualitas tertentu dengan harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan antara masukan dengan nilai masukan yang seharusnya. Terkait dengan organisasi sektor publik yang sejauh mana dapat meminimalisir sumber daya yang akan digunakan, dengan menghindari pengeluaran yang tidak produktif. Ekonomi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Input} \times 100\%}{\text{Input value}}$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti ekonomis

Jika > 100% berarti tidak ekonomis

Jika = 100% berarti ekonomis berimbang

Sedangkan pada efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktivitas. Suatu organisasi, program ataupun kegiatan dapat dikatakan efisien apabila dapat menghasilkan *output* tertentu dengan *input* serendah-rendahnya, atau dengan *input* tertentu mampu menghasilkan *output* sebesar-besarnya. Efisiensi dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Output} \times 100\%}{\text{Input}}$$

Ketentuan :

Jika < 100% berarti efisien

Jika > 100% berarti tidak efisien

Jika = 100% berarti efisien berimbang

2. Indikator kualitas pelayanan (efektivitas)

Efektivitas artinya pengeluaran yang berkontribusi terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan sebuah kegiatan atau kebijakan yang mengukur efektivitas merupakan refleksi *output*. Efektivitas merupakan hubungan antara *output* dengan tujuan, semakin besar kontribusi yang dibuat *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan.

Nordiawan (2018), efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang telah dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Outcome} \times 100\%}{\text{Output}}$$

Ketentuan :

Jika > 100% berarti efektif

Jika < 100% berarti tidak efektif

Jika = 100% berarti efektivitas berimbang

Dari uraian diatas, bahwa ketiga pokok dalam bahasan *value for money* sangat keterkaitan satu dengan yang lainnya.

2.1.4. Manfaat Value For Money

Menurut Halim (2006), konsep value for money sangat penting bagi pemerintah sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat karena akan memberikan banyak manfaat, yaitu :

1. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, artinya pelayanan yang diberikan tepat sasaran.
2. Meningkatkan mutu pelayanan publik.
3. Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.
4. Alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik.
5. Meningkatkan kesadaran akan uang publik sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Manfaat ekonomi dalam value for money yaitu untuk menghindari pengeluaran yang berlebihan pada suatu organisasi yang dapat menimbulkan kegiatan yang tidak produktif pada organisasi.

Manfaat efisiensi dalam value for money yaitu untuk menetapkan standar kerja yang tepat bagi Perusahaan dalam peningkatan kinerja yang lebih baik, juga supaya organisasi dapat mencapai target yang telah ditetapkan dengan penggunaan biaya yang serendah-rendahnya dan menghasilkan tingkat pengeluaran yang optimal.

Manfaat efektivitas dalam value for money adalah untuk mengetahui kegiatan apa saja yang telah dicapai oleh organisasi tersebut serta mengetahui apa saja yang telah berhasil dilakukan dalam target yang sudah ditetapkan.

2.2. Akuntabilitas Publik

2.2.1. Pengertian Akuntabilitas Publik

Menurut Mardiasmo (2005), menjelaskan bahwa akuntabilitas publik sebagai pemegang mandat (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukannya kepada pihak yang memberi mandat (principal) yang memiliki hak untuk mendapat pertanggungjawaban.

Menurut Ulum (2010:40), Akuntabilitas publik adalah perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Mahmudi (2010), akuntabilitas public merupakan kewajiban pemerintah untuk mengelola sumber daya, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Secara umum akuntabilitas publik diartikan sebagai bentuk kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi dalam mencapai suatu tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi antara pemerintah dengan masyarakat.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam yaitu :

1. Akuntabilitas Vertikal (*vertical accountability*) adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
2. Akuntabilitas Horizontal (*horizontal accountability*) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Konteks organisasi pemerintahan akuntabilitas publik untuk memeberikan informasi dan penyingkapan atas aktivitas dari kinerja *financial* pemerintah kepada pihak yang berkepentingan dengan laporan tersebut.

2.2.2. Dimensi Akuntabilitas

Menurut Harun (2009), ada empat bentuk pertanggungjawaban publik dari pemerintah daerah yang harus dilakukan yaitu:

1. Akuntabilitas hukum dan kejujuran (*accountability for probity and legality*)

Akuntabilitas hukum (*legal accountability*) mengacu pada penegakkan hukum serta peraturan lain yang diperlukan untuk penerapan dana publik. *Accountability for probity* mengacu pada pencegahan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*).

2. Akuntabilitas proses

Untuk menilai prosedur yang dilaksanakan pada pelaksanaan kegiatan sudah terlaksana dengan tepat atau belum dalam kaitannya dengan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen , dan prosedur administrasi, inilah yang dimaksud dalam akuntabilitas proses. Akuntabilitas proses adalah penyelenggaraan pelayanan publik yang responsif, tanggap , dan hemat biaya.

3. Akuntabilitas program

Lebih memperhatikan terkait sasaran yang sudah ditentukan bisa terwujud atau tidak , dan juga memperhatikan preferensi kegiatan program yang menunjukkan hasil terbaik dengan menggunakan biaya terendah.

4. Akuntabilitas kebijakan

Mengacu pada pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah mengenai prosedur yang dibuat oleh pemerintah bagi DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Tuntutan akuntabilitas menguat karena tidak dapat terlepas pada akuntansi sektor publik , yang pada dasarnya diharapkan dapat memfasilitasi terciptanya akuntabilitas publik dan sebagai alat perencanaan serta pengendalian bagi instansi sektor publik secara efektif dan efisien.

2.3. Hubungan Antara Value For Money dan Akuntabilitas Publik

Menurut Inda (2006), dalam asumsi UU No. 17/2003 akuntabilitas hasil sebagai notasis yang dipertanggungjawabkan. Yang dimaksud dengan indikator

hasil yaitu ekonom, efisiensi, dan efektifitas yang harus direfleksikan dalam laporan pertanggungjawaban pemerintah.

Menurut Mahsun (2013), manfaat implementasi konsep *value for money* sendiri pada organisasi sektor public adalah untuk meningkatkan kesadaran akan uang public sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

Maka dapat diartikan hubungan *value for money* dan akuntabilitas public adalah salah satu unsur pokok untuk perwujudan yang baik yang masih diupayakan oleh pemerintah. Pemerintah diminta untuk melaporkan program apa saja yang dilakukan secara transparansi sehingga masyarakat dapat menilai apakah pemerintah sudah bekerja sesuai konsep *value for money* yaitu secara ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Pengaruh Ekonomi Dalam Konsep *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik

Menurut Mursyidi (2013) akuntabilitas publik adalah mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan atas pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai akuntabilitas publik yang baik harus digunakannya pengukuran *value for money*.

Ekonomi dalam *value for money* sendiri merupakan perolehan input dengan kualitas terbaik dengan memakai harga yang terendah untuk menghindari

pengeluaran yang boros dan tidak efektif. Oleh karena itu, untuk melihat sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input *resources* yang digunakan yaitu menerapkan prinsip ekonomi dalam *value for money* dengan akuntabilitas publik yang baik, sebagaimana kewajiban pemerintah yang harus melaporkan pengelolaan sumber daya publik secara responsif, transparan dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat.

H_1 = Ekonomi dalam konsep *Value For Money* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik

2.4.2. Pengaruh Efisiensi Dalam Konsep *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik

Efisiensi dalam konsep *value for money* yaitu suatu pencapaian *output* yang maksimum atau terendah dengan *input* tertentu untuk mencapai *ouput* tertentu dengan menggunakan perbandingan antara *output* dan *input* yang berkaitan dengan target yang telah ditetapkan. Pengelolaan keuangan dan sumber daya organisasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dalam *value for money* dapat meningkatkan pencapaian akuntabilitas organisasi yang baik kepada pemerintah maupun kepada masyarakat.

H_2 = Efisiensi dalam konsep *Value For Money* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik

2.4.3. Pengaruh Efektivitas Dalam Konsep *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik

Efektivitas dalam konsep *value for money* ada dasarnya berhubungan erat dengan hasil atau pencapaian tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan secara sederhana. Efektivitas dapat dikatakan berjalan secara efektif apabila ukuran berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas hanya melihat apakah suatu kegiatan telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

H₃ = Efektivitas dalam konsep *Value For Money* berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Publik

2.5. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang sejenis dan berperan penting dalam sebuah penelitian yang akan dilakukan. Dengan adanya penelitian-penelitian sebelumnya akan dapat membantu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang mendasari penelitian ini sebagai berikut :

Penelitian terdahulu pertama ditulis oleh Julius Saputra (2015) dengan judul yaitu “Pengaruh *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pada Badan Pemerintahan Daerah Kota Palembang)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif, komperatif, dan asosiatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *value for money* (Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas) berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

Penelitian terdahulu kedua ditulis oleh Laksmi Prihatiningsih (2022) dengan judul yaitu “Pengaruh *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik (Studi Kasus Pemerintahan Desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa)”. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah ekonomi dapat mempengaruhi akuntabilitas Publik di Pemerintahan desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, untuk mengetahui apakah efisiensi dapat mempengaruhi akuntabilitas publik di Pemerintahan desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, dan untuk menguji efektivitas dapat mempengaruhi akuntabilitas publik di Pemerintahan desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang memfokuskan pada konsep *value for money* yang diterapkan pada akuntabilitas publik di Pemerintahan desa Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil penelitian tersebut dapat diambil kesimpulannya bahwa yang 1) Ekonom tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik , hal ini dikarenakan dilihat dari nilai signifikan yang lebih dari nol koma lima. 2) Efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik , hal ini dikarenakan nilai signifikan kurang dari nol koma lima. 3) Efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik , hal ini dikarenakan dilihat dari nilai signifikan yang lebih dari nol koma lima.

Penelitian terdahulu ketiga ditulis oleh Demi Aulia Arfan (2014) dengan judul yaitu “Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta Periode Tahun 2011-2012”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011-2012 ditinjau dari elemen ekonomi, untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011-2012 ditinjau dari

elemen efisiensi, dan untuk mengetahui kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta periode tahun 2011-2012 ditinjau dari elemen efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang memfokuskan kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menggunakan konsep *value for money*. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dari ketiga elemen *value for money* yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas sangat berpengaruh pada kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta di tahun 2011 dan tahun 2012. Pada masing – masing elemen – elemen tersebut menunjukkan hasil yang signifikan pada kinerja Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2011 dan tahun 2012.

Penelitian terdahulu keempat ditulis oleh Sri Astuti (2016) dengan judul yaitu “Penerapan Konsep *Value For Money* Dalam Menilai Kinerja Pelayanan Sektor Publik Pada Rumah Sakit Labuang Baji Kota Makassar”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep pengukuran *value for money* diterapkan dalam instansi pemerintahan dan menggambarkan hasil pengukuran kinerja pelayanan publik dari instansi pemerintahan dalam hal ini Dinas Pelayanan Kesehatan Kota Makassar berdasarkan pendekatan konsep. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang lebih condong ke *value for money* yang dilihat dari segi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas pada kinerja keuangan di rumah sakit labuang baji kota Makassar. Hasil penelitian dapat disimpulkan secara umum bahwa rumah sakit Labuang Baji belum menerapkan metode pengukuran kinerja yang dapat memberikan gambaran perusahaan secara menyeluruh karena pengukuran kinerja yang digunakan adalah

pengukuran yang hanya menitik beratkan pada pengukuran kinerja keuangan. Penggunaan *Value For Money* sebagai alat ukur kinerja yang lebih komprehensif yang sangat memungkinkan dapat diterapkan pada rumah sakit Labuang Baji di kota Makassar yang mencoba menetapkan target untuk masing-masing komponen yang akan diukur kemudian dilakukan penilaian apakah telah dicapai atau tidak sama sekali.

Penelitian terdahulu yang kelima dditulis oleh Fitriani (2017) dengan judul skripsi yaitu “Analisis *Value For Money* Dalam Pengukuran Kinerja Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif yang memfokuskan pada konsep *value for money* pada kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan hewan di Kabupaten Bulukumba. Hasil penelitian pada skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa kinerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Bulukumba ditinjau dari elemen ekonomi, efisiensi, dan efektivitas telah memenuhi syarat *value for money* dimana setiap elemen mencapai nilai rasio yang mencapai maksimal dan disertai pula penghematan anggaran setiap tahunnya.

Tabel 2. 1.

Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel Penelitian	Subjek Penelitian	Hasil

1	Julius Saputra (2015)	X1: Ekonomi X2: Efisiensi X3: Efektivitas Y: Akuntabilitas Publik	Badan Pemerintahan Daerah Kota Pelembang	Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap Akuntabilitas Publik
2	Laksmi (2022)	X1: <i>Value For Money</i> dimensi Ekonomi X2: <i>Value for Money</i> dimensi Efisiensi X3: <i>Value For Money</i> dimensi Efektivitas Y: Akuntabilitas Publik	Pemerintahan desa Kecamatan Bajeng di Kabupaten Gowa	Ekonomi dan Efektivitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas publik, sedangkan Efisiensi berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.
3	Demi Aulia	X1: Ekonomi	Kepala sub bagian	Ekonomi,

	Arfan (2014)	X2: Efisiensi X3: Efektivitas Y: Kinerja Pegawai	administrasi data dan pelaporan Dinas Pertanian Daerah Istimewa Yogyakarta	Efisien, dan Efektivitas berpengaruh positif signifikan terhadap Kinerja Pegawai
4	Sri Astuti (2016)	X1: Ekonomi X2: Efisiensi X3: Efektivitas Y: Kinerja Pelayanan	Rumah Sakit Labuang Bajikota Makassar	Ekonomi, Efisien, dan Efektivitas berpengaruh positif terhadap Kinerja Pelayanan
5	Fitriani (2017)	X1: Ekonomi X2: Efisiensi X3: Efektivitas Y: Kinerja Pegawai	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Babupaten Bukukumba	Ekonomi, Efisiensi, Efektivitas berpengaruh positif terhadap Kinerja

				Karyawan.
--	--	--	--	-----------

